

MANAJEMEN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Alizah Maharani¹, Ayu Mufti Zahra², Devi Setianingsih³, Selliana Safitri⁴, Shinta Nur Pramesti⁵, Eti Hadiati⁶

^{1,2,3,4,5,6}UIN Raden Intan Lampung

maharanializah172@gmail.com¹, ayumufti57@gmail.com², devisetianingsih@gmail.com³, sellianasftr01@gmail.com⁴, nurshinta0226@gmail.com⁵, eti.hadiati@radenintan.ac.id⁶

ABSTRACT; *This research addresses the importance of effective planning in managing the establishment of PAUD institutions. This occurs due to various challenges that continue to arise during the establishment of PAUD facilities. Ergo, the optimal achievement of establishing a PAUD institution remains unattainable. Hence, in management, there exists a procedure involving planning, organizing, leadership, and control within the process of establishing PAUD. In laying the foundations for a PAUD institution, a serious approach to management is essential to ensure the institution's optimal performance. The research methodology involves a thorough examination of literature. Method of gathering data by collecting basic reference books and supporting literature to explore theories linked to the management of early childhood education establishments. The method for analyzing data is content analysis. The findings of this research indicate that when planning the management for setting up PAUD institutions, the government has specified various requirements. These include: a) general prerequisites for the establishment of PAUD institutions, b) procedures for organizing PAUD, and c) drafting proposals for the establishment of PAUD.*

Keywords: *Establishment Management of Institutions, Early Childhood Education.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas pentingnya perencanaan dalam manajemen pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mengingat adanya berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses pendirian tersebut. Kendala-kendala ini mengakibatkan tujuan pendirian lembaga PAUD tidak dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam manajemen pendirian lembaga PAUD diperlukan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Pendirian lembaga PAUD harus dikelola dengan serius agar dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari buku referensi utama dan buku pendukung yang relevan untuk mengkaji teori manajemen dalam pendirian lembaga PAUD. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan manajemen pendirian lembaga PAUD terdapat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain: a) syarat umum

pendirian lembaga PAUD, b) mekanisme pendirian PAUD, dan c) penyusunan proposal pendirian PAUD.

Kata Kunci: Manajemen Pendirian Lembaga, Pendidikan Anak Usia Dini.

PENDAHULUAN

Tahap awal kehidupan manusia pada usia dini adalah fondasi yang paling mendasar bagi seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase ini, anak-anak berada pada tahap yang sangat krusial dalam hidup mereka, karena ini adalah periode yang paling signifikan dalam perkembangan. Ciri khas anak usia dini sering kali disebut sebagai "golden age." Pada masa ini, anak-anak fokus pada berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan moral, motorik fisik, kognitif, sosial-emosional, serta bahasa dan komunikasi.

Manajemen dapat dianggap sebagai suatu kegiatan organisasi yang memerlukan pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kode etik ini. Oleh karena itu, manajemen berupaya menyatukan seluruh kepentingan pendidikan para pemimpin lembaga pendidikan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perkembangan anak usia 0 hingga 6 tahun berlangsung secara optimal, serta mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan berikutnya melalui kegiatan yang terstruktur. (Wiyani 2018, pp. 26)

Artikel ini bertujuan untuk membahas manajemen dalam pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Agar proses pendirian lembaga PAUD dapat berjalan dengan lancar, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipatuhi. Setiap organisasi, baik yang besar maupun kecil, memerlukan pengendalian yang baik agar dapat berkembang sesuai harapan. Pendidikan anak usia dini merupakan bidang yang relatif baru dan sedang berkembang di berbagai daerah, namun masih ada banyak daerah yang belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan memfokuskan pada mekanisme administratif dalam pembentukan lembaga PAUD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi kepustakaan, sering disebut sebagai penelitian teks. Kajian ini terdiri dari beberapa komponen: pertama, ia berfungsi sebagai studi teoritis, yang merupakan langkah paling krusial dalam pengembangan empiris suatu disiplin ilmu. Kedua, penelitian ini berusaha mempertimbangkan seluruh objek yang diteliti dari perspektif teoritis

yang berkaitan dengan validitas. Ketiga, penelitian ini memberikan peluang untuk mempelajari teori dari sudut pandang linguistik. Keempat, kajian ini menyentuh aspek karya sastra. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada studi literatur mengenai pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini. Karya ini diharapkan dapat membantu para pendidik memahami berbagai syarat dan langkah yang diperlukan dalam mendirikan fasilitas pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

KAJIAN TEORI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan manajemen sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan (Susanto, 2018, 2). Oleh karena itu, manajemen berfungsi untuk mengatur setiap kegiatan agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Dalam aspek bahasa, istilah “manajemen” berasal dari bahasa Inggris, yang berakar dari kata “manage” yang berarti ‘memimpin’ atau ‘melanjutkan’, serta dari istilah “to lead” yang mencakup pengelolaan, pengaturan, dan pelaksanaan. Selain itu, Oxford Advanced Learner's Dictionary (A. S. Hornby, 2000, 528) mendeskripsikan manajemen sebagai tindakan untuk melakukan sesuatu dengan baik, terutama ketika menghadapi tantangan. Dengan demikian, manajemen dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku dalam konteks bisnis, individu, atau situasi, serta mengatasinya dengan efektif.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, manajemen adalah sebuah proses yang berlangsung dalam suatu kerangka siklus, yang mencakup kepemimpinan dan pengelolaan dengan tujuan yang terstruktur. Dalam bukunya yang berjudul "Manajemen PAUD", T. Hani Handko menyimpulkan bahwa manajemen melibatkan sekumpulan aktivitas, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengarahan, dan pengawasan. Dengan demikian, manajemen dapat dipahami sebagai proses yang mencakup seluruh tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengelolaan sumber daya manusia, semua dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan secara sistematis proses interaksi pendidikan dua arah antara peserta didik dan pendidik, dengan tujuan mencapai sasaran pendidikan anak usia dini (Ulfah, 2015, hlm.

26). PAUD merupakan fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun non-fisik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami migrasi penduduk yang signifikan dari kota ke desa (Suharuni, 2019, hlm. 2). Pada periode prasekolah, anak-anak memiliki kesempatan yang istimewa untuk memperkenalkan diri pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, momen belajar di usia dini adalah peluang besar yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal, mengingat rasa ingin tahu yang tinggi pada anak-anak di usia ini (Mulyasa, 2017, hlm. 34).

Definisi manajemen menunjukkan bahwa setiap organisasi, termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah, memerlukan manajemen untuk berfungsi dengan baik. Pada dasarnya, manajemen adalah proses yang mengorganisir individu-individu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Dalam praktiknya, manajemen mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsinya.

1. Manajemen adalah suatu kegiatan
2. Manajemen memanfaatkan pihak-pihak lain
3. Kegiatan manajemen ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu

Pada abad ke-20, manajemen dikenal memiliki 5 fungsi. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi-fungsi ini berkembang, berubah, dan akhirnya disederhanakan menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat fungsi tersebut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah langkah awal yang krusial dalam menentukan tujuan keseluruhan perusahaan serta merumuskan cara terbaik untuk mencapainya. Tahapan ini dianggap sebagai fondasi paling penting di antara seluruh fungsi manajemen lainnya, karena tanpa perencanaan yang baik, fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan dengan efektif. Secara sederhana, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Namun, ada kendala dalam proses perencanaan yang perlu diatasi, yakni mencari jawaban atas enam pertanyaan mendasar berikut ini: (5W+1H).

- a. Tindakan apa yang perlu dilakukan?
- b. Mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan?
- c. Dimana tindakan tersebut seharusnya dilakukan?

d. Kapan tindakan tersebut harus dilakukan?

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga memudahkan manajer dalam mengawasi dan menentukan sumber daya manusia yang diperlukan. Proses ini melibatkan penetapan tugas yang harus dilaksanakan, penunjukan pelaksana, pengaturan cara pembagian tugas, serta penentuan siapa yang bertanggung jawab atas tiap aspek. Selain itu, pengorganisasian juga menetapkan tingkat keputusan yang dapat diambil, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan langkah yang diperlukan agar semua anggota tim bisa bekerja sesuai dengan rencana manajemen yang sudah disusun.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Umumnya, pengawasan memiliki kesamaan yang erat dengan pengendalian. Pengendalian sendiri adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan penilaian yang mendalam dan, jika diperlukan, melakukan perbaikan. Tujuannya adalah agar aktivitas yang dilakukan oleh bawahan dapat diarahkan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keadaan seperti ini menarik perhatian masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan terhadap lembaga pendidikan, terutama di tingkat prasekolah atau Taman Kanak-kanak. Oleh karena itu, semakin banyak orang tua yang menyadari pentingnya memberikan rangsangan yang lebih awal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pun bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dipahami sebagai pencapaian program pendidikan yang tepat dan melibatkan semua komponen lembaga pendidikan. Dengan demikian, tujuan PAUD dapat diwujudkan secara optimal. Proses manajemen dilakukan melalui langkah-langkah yang dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui peran orang lain. Dengan kata lain, setiap manajer

atau pengelola memiliki tugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain demi tercapainya tujuan organisasi. (Firmansyah and Wardhana 2016, pp.) 259).

Manajemen PAUD mempertimbangkan apa yang dikelola, bagaimana caranya, cara merencanakannya, dan arah yang diambil manajemen. Dalam manajemen PAUD, terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari pendirian lembaga, tata kelola, hingga pengembangan sekolah PAUD. (Asiah 2018, pp. 55–56).

Proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik berkat adanya lembaga pendidikan yang telah terbentuk baik secara fisik maupun struktural. Pend establishment lembaga pendidikan sangat erat kaitannya dengan kegiatan manajemen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, manajemen suatu kegiatan mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah langkah mendirikan lembaga pendidikan yang fokus pada anak usia dini dengan mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, manajemen pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mendirikan lembaga pendidikan anak secara efektif dan efisien, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap jenis satuan PAUD memiliki beragam prinsip penyelenggaraan yang berbeda-beda. (Munastiwi 2019,pp.31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, manajemen pendirian PAUD melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang dilakukan dengan efektif dan efisien, guna mendirikan institusi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Setiap jenis satuan PAUD memiliki prinsip penyelenggaraan yang unik, yang membedakannya satu sama lain. (Munastiwi 2019, pp.31).

Syarat pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 84 Tahun 2014, yang menggariskan ketentuan

mengenai pendirian satuan pendidikan anak usia dini. Peraturan ini menjelaskan berbagai syarat yang harus dipenuhi baik untuk mendirikan PAUD formal maupun non-formal. Lembaga PAUD dapat didirikan oleh individu, komunitas, badan hukum, serta pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten atau kota. Dalam proses pendirian tersebut, terdapat dua jenis persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan Administratif

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, khususnya Pasal 4, menggarisbawahi pentingnya memenuhi persyaratan administratif dalam pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Persyaratan ini meliputi fotokopi identitas pendirian, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, serta susunan pengurus lengkap dengan rincian tugas masing-masing.

Sebagai syarat administratif yang juga tak kalah penting, pemenuhan struktur kepengurusan lembaga PAUD harus diperhatikan. Komponen minimal yang harus ada dalam struktur tersebut terdiri dari: pembina, penasihat, penanggung jawab, direktur, kepala sekolah, pendidik atau guru, kepala tata usaha, dan bendahara. Setiap posisi dalam pengurus ini memiliki peran krusial untuk memastikan kelancaran operasional lembaga PAUD yang akan didirikan.

Struktur pengurus dapat disesuaikan, baik dengan menambah maupun mengurangi anggotanya, sesuai dengan kebutuhan lembaga PAUD. Dengan demikian, persyaratan administratif untuk pengajuan kepada pihak berwenang menjadi layak. Ketentuan ini ditetapkan agar pendirian PAUD sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. (Munastiwi (2019), pp.32).

1. Persyaratan teknis pendirian PAUD

Menurut Ulfah dalam bukunya "Manajemen Lembaga PAUD untuk Pengelola Pemula," persyaratan teknis merujuk pada metode atau cara tertentu yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi dalam penyelenggaraan lembaga PAUD. Selain itu, lembaga PAUD juga diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 terkait persyaratan teknis tersebut. Ini mencakup:

- a. Hasil penilaian kelayakan. Penilaian kelayakan bergantung pada kelengkapan dokumen dan data berikut:

1. Proses ini dimulai dengan pengumpulan berbagai dokumen, termasuk dokumen hak milik lembaga, sewa, atau pinjaman yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan untuk lembaga pendidikan yang sah, sesuai dengan nama pendirinya.
2. Selanjutnya, mohon untuk melampirkan fotokopi akta notaris serta surat penetapan badan hukum yang sesuai dengan lembaga, perkumpulan, atau badan sejenis dari Kementerian Hukum. Dokumen tersebut harus tertera atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri, disertai dengan surat keputusan yang menjelaskan adanya hubungan dengan organisasi induk.
3. Selanjutnya, data yang akan digunakan untuk memperkirakan biaya dalam proses kelangsungan lembaga pendidikan dan Sekolah Pendidikan Sosial (SPS) setidaknya mencakup satu tahun kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, dokumen persyaratan untuk pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dianggap memenuhi syarat jika semua persyaratan yang berlaku dipenuhi secara menyeluruh.
 - a. Rencana induk pengembangan perlu mencakup berbagai aspek penting, antara lain visi, misi, tujuan, strategi, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, serta pengelolaan kelembagaan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
 - b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu disusun dengan jangka waktu maksimum tiga tahun untuk lembaga formal dan satu tahun untuk lembaga nonformal PAUD. Standar tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti perkembangan anak, isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, serta sumber pendanaan. Oleh karena itu, persyaratan teknis yang diperlukan untuk mendirikan lembaga PAUD memberikan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Sebaiknya, ketiga syarat teknis ini sudah disusun dan didokumentasikan dengan baik sebelum mengajukan permohonan izin kepada pemerintah. (Munastiwi 2019, pp. 35).
4. Mekanisme pendirian PAUD

Lembaga PAUD memiliki mekanisme untuk mendirikan lembaga yang setara dengan kabupaten/kota lainnya. Mekanisme ini akan diimplementasikan setelah

semua persyaratan umum yang telah dijelaskan terpenuhi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan informasikan. Setelah seluruh syarat umum dipenuhi, disarankan agar pihak pendiri atau yayasan berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat. Mereka dapat menanyakan prosedur teknis yang perlu disiapkan agar izin penyelenggaraan dapat diperoleh. Biasanya, dinas pendidikan setempat akan menyampaikan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat domisili
2. Program kerja PAUD selama satu tahun pelajaran
3. Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW
4. Surat rekomendasi lurah
5. Rekomendasi dinas pendidikan kecamatan
6. Rekomendasi camat dari dinas kecamatan setempat
7. Akta yayasan penyelenggara

Semua dokumen diperlukan harus disertakan dalam proposal pendirian PAUD. Selanjutnya, proposal tersebut sebaiknya dikirimkan kepada pihak yang relevan, seperti kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk mendapatkan izin pendirian, pengajuan dapat dilakukan langsung ke kantor Departemen Pendidikan Nasional tingkat kabupaten/kota dengan melampirkan ketujuh dokumen yang telah disebutkan sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa pengajuan usulan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan oleh yayasan yang merupakan badan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat 1, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Dalam rangka mendirikan sebuah lembaga, terdapat persyaratan umum yang perlu dipenuhi oleh yayasan yang ingin mendirikan PAUD. Sesuai Pasal 62 ayat 2, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi untuk mendirikan lembaga pendidikan, antara lain:

1. Kurikulum
2. Peserta didik
3. Tenaga kependidikan
4. Sarana dan prasarana
5. Pembiayaan dan pendidikan
6. Sistem evaluasi

Penyusunan Proposal Pendirian PAUD

Untuk memulai pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan visi, misi, tujuan, dan target yang ingin dicapai. Setelah semua elemen tersebut disusun dengan baik, kita dapat melanjutkan dengan menyiapkan proposal pendirian PAUD. Proses penyusunan proposal ini melibatkan beberapa langkah persiapan yang penting sebelum penulisan proposal itu sendiri. Salah satu langkah awal yang krusial adalah menentukan berbagai aktivitas dan rencana yang akan dilaksanakan. Jadi, proses ini mirip dengan studi kelayakan di sebuah lembaga. Secara ringkas, ada tujuh langkah yang harus diikuti dalam menyusun proposal pendirian PAUD, dan jumlah langkah ini tidak dapat ditambah atau dikurangi. Hal ini karena tidak ada tahapan resmi yang mengatur mulai dan akhir penyusunan proposal untuk pendirian lembaga PAUD. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam menyusun proposal tersebut:

1. Survei dan analisis jumlah anak dan keluarga
2. Menggalang dukungan tokoh masyarakat
3. Identifikasi lokasi dan sarana prasarana
4. Menghimpun dana
5. Mengkaji kurikulum yang akan digunakan
6. Analisis referensi yang relevan
7. Menuangkan dalam bentuk proposal

Sistematika proposal pendirian PAUD menurut Suyadi yang dikutip Erni, yaitu:

1. Judul proposal
2. Latar belakang
3. Visi dan misi lembaga PAUD
4. Tujuan dan kompetensi lulusan
5. Kurikulum atau program yang diusulkan
6. Sumber daya manusia
7. Calon anak didik sasaran lembaga PAUD
8. Sarana dan prasarana yang direncanakan
9. Jenis layanan pendidikan
10. Sumber biaya dan pembiayaan (Munastiwi 2019, pp. 50).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 62 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, harus mendapatkan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan adanya penetapan peraturan tersebut, maka pendirian lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan serta mengikuti prosedur pendirian yang ditetapkan untuk mendapat izin pendirian. Setelah lembaga PAUD memperoleh izin, maka izin yang telah diperoleh dapat digunakan untuk memperoleh legalitas atau pengesahan. Legalitas yang dimaksud adalah legalitas keberadaan lembaga PAUD sebagai bagian proses administratif dan pembinaan penyelenggaraan PAUD oleh pemerintah. Karenanya, untuk menjalankan tahapan pendirian PAUD dengan efektif dan efisien, manajemen pendirian PAUD diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, Siti Nor. (2018). “*Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD Dan PNF Di Kutai Kartanegara.*” SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)6 (1). <https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1325>.
- Firmansyah, Egi Arvian, and Wardhana Wardhana. (2016). “*Penguatan Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Garawangi dan Desa Rancaputat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.*” JURNAL PENELITIAN10 (2). <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1673>.
- Kompasiana.com. n.d. “*Syarat Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).*” KOMPASIANA. Accessed February 20, 2020. <https://www.kompasiana.com/mashnaalhumairo/54f70a35a3331101258b4646/syarat-pendirian-pendidikan-anak-usia-dini-paud>.
- Mulyasa, H.E. (2017). *Manajemen PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munastiwi, Erni. (2019). *Manajemen Lembaga PAUD Untuk Pengelola Pemula*. Yogyakarta: CV Istana Agency Istana Publishing.
- Suharni Suharni, M. Pd. (2019). “*Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Pada PAUD Bintang Rabbani Pekanbaru.*” Jurnal Ilmiah Potensia4 (1): 1–5. <https://doi.org/10.33369/jip.4.1.1-5>.
- Susanto, Ahmad. (2018). *Konsep, Strategi, Dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. 2nd ed. Depok: Prenamedia Group.

Suyadi. (2017). *Manajemen PAUD*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ulfah, Fari. (2015). *Manajemen PAUD Pengembangan Jejaring Kemitraan Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiyani, Novan Ardy.(2018). “*KONSEP MANAJEMEN PAUD BERDAYA SAING.*” *aş-şibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*3 (01): 25–44.